

	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal											
1	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	REFOCUSING									
C	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat											
1	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar Gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	Orang	40	58	145,00%	97	242,50%	80	200,00%	40	0,00%
2	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	29	15	51,72%	18	62,07%	29	100,00%	-	0,00%
3	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang	50	-	0,00%	1	2,00%	50	100,00%	-	100,00%
4	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	Orang	30	1	3,33%	3	10,00%	5	16,67%	8	26,67%
5	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	8	26,67%	6	20,00%	24	80,00%	14	46,67%

6	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	58	193,33%	98	326,67%	30	100,00%	-	0,00%
7	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	Orang	30	2	6,67%	6	20,00%	2	6,67%	13	43,33%
8	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	2	6,67%	5	16,67%	2	6,67%	11	36,67%
9	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	25	100,00%
10	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	1	5,00%	1	5,00%	6	30,00%	4	20,00%
11	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kab/Kota	Orang	25	78	312,00%	104	416,00%	49	196,00%	49	196,00%
12	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	2	10,00%	3	15,00%	12	60,00%	9	45,00%
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											
1	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	REFOCUSING									
2	1.06.04.2.02.0014	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Kemitraan yang Bekerjasama dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	50	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

D	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Lembaga	30								
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak - anak Terlantar											
1	1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak - Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten kota	Orang	20	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
2	1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak - Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	20	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
3	1.06.05.2.01.03	Pemantauan Anak - Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten / kota	Orang	20	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
1	1.06.05.2.02.01	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	34.000	10.994	32%	16.455	48%	-	0%	-	0%
2	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten / kota	Keluarga	103.538	108.811	105%	110.048	106%	-	0%	-	0%
3	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten / kota	Keluarga	30.701	31.894	104%	31.905	104%	-	0%	-	0%
4	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatk bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten / kota	Orang	20	-	0%	20	100%	20	100%	20	100%
E		PROGRAM PENANGANAN BENCANA											
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial											
1	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	802	802%	848	848%	882	882%	1088	1088%

2	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70	802	1146%	848	1211%	882	1260%	1088	1554%
3	1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
4	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	18	60%	31	103%	45	150%	109	363%
5	1.06.06.2.01.04	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	0	0%	6	20%	12	40%	42	140%
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota											
1	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
2	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	18	18	100%	18	100%	18	100%	18	100%
F	2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tercapainya Kesetaraan Gender	Persen	100								
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	100	-							
1	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	25	4.200.000	9%	-	-	19.800.000	44%	14.680.000	33%

2	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	25	-	-	-	-	31.814.500	80%	-	0%
3	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Terfasilitasinya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Perangkat Daerah	40	-	-	-	-	-	-	43.721.000	87%
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	100								
1	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Tercapainya Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	100	35.100.000	47%	-	-	-	-	21.290.000	28%
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persen	100								
1	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	1	-	-	-	-	-	-	18.294.000	37%
G	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1								

1	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan "Pencegahan Kekerasan terhadap anak, Perkawinan Anak dan Stunting melalui Pengasuhan Positif". Peserta, 30 Orang, dihadiri oleh Kader Motekar, Peangkat Desa dan Lembaga Masyarakat	100%
---	-------------------	---	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	------

2	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	2	Pembayaran Honorarium bulan Desember Tahun 2023 yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut : 1. Honorarium Penyuluh dan Pendampingan (4 Orang) 2. Honorarium Pegawai Bale Titirah/P2TP2 A (5 Orang)	25%	A. Pembayaran Honorarium bulan Januari s.d. April Tahun 2024 yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut : 1. Honorarium Penyuluh dan Pendampingan (4 Orang) 2. Honorarium Pegawai Bale Titirah/P2TP2 A (5 Orang) B. Pembayaran Honorarium bulan Mei Tahun 2024 yang	25%	A. Pembayaran Honorarium bulan Juni s.d. Agustus Tahun 2024, yang dibayarkan pada bulan September dengan rincian sebagai berikut : 1. Honorarium Penyuluh dan Pendampingan (3 Orang) 2. Honorarium Pegawai Bale Titirah/P2TP2 A (5 Orang)	25%	-	-
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	50								

	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persen	100								
1	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Pelaksanaan penyediaan layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	KK Binaan P2WKSS	100	16.252.000	24%	3.150.000	5%	19.377.000	28%	29.420.000	42%
I	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya data gender dan Anak										
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data pilah gender	Persen	100								
1	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	1		47%						
J	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK											
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organsiasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	50								

1	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha	Jumlah organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	50	-	-	1. Kegiatan Rakor Gugus Tugas KLA ke 1, peserta 35 Orang dari OPD Kabupaten Purwakarta. 2. Kegiatan Rakor APSAI, peserta 35 Orang dari Perusahaan Kabupaten Purwakarta. 3. Kegiatan Bimtek KHA Gugus Tugas KLA, peserta 35 Orang dari OPD Kabupaten Purwakarta.	68%	1. Kegiatan Rakor PUSPAGA untuk menunjang KLA, peserta 35 Orang dihadiri TP. PKK Kecamatan, Ketua PUSPAGA Kecamatan dan PUSPAGA Kabupaten	17%	1. Kegiatan Rakor KLA ke 3, peserta 35 Orang peserta 35 Orang dari OPD Kabupaten Purwakarta.	16%
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Persen	98								
1	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	-	-	-	-	Kegiatan Kapsitas Building Cegah Dampak Digitalisasi, peserta 30 Orang, diikuti oleh Forum Anak Purwakarta	94%	-	-

Purwakarta, 13 Januari 2025
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta,



H. DIDI SUARDI, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660525 198803 1 008